

Kinerja Bagian

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

hami kenapa masih tetap dipertahankan. Tapi ingat, sekalipun begitu, tidak ada bawahan yang salah, kembali lagi persoalannya kepada bupati, berarti bupati tidak jeli menempatkan pejabat,” kata praktisi hukum, Asep Agustian atau kerap disapa Asep Kuncir (Askun), kemarin (23/1).

Satu contoh saja, sampai saat ini aturan teknis soal perda no. 3 Tahun 2016 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah dan perda no 18 tahun Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata, sudah mangkrak selama 4 tahun tak kunjung beres.

Sementara itu, soal buruknya keterbukaan informasi publik dan implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2017, Angoota DPRD

Karawang, Indriyani meminta Bagian Hukum Setda Pemkab Karawang melakukan updating data pada JDIH Kabupaten Karawang.

Perpres No. 33 Tahun 2012 yang menggantikan Perpres No. 91 Tahun 1999, kata Indri menjelaskan lebih rinci terkait JDIH, konsep pengarsipan Perda dan Perbup yang selama ini dianggap berceceran melalui JDIH diharapkan bisa lebih tertib dan sistematis.

“Sehingga masyarakat umum secara terbuka bisa mengakses setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif maupun eksekutif

Indri menyayangkan beberapa produk hukum lima tahun kebelakang ini dianggap tidak efektif, salahnya satunya adalah banyaknya perda yang belum diterbitkan Perbupnya.

Selain itu banyak produk hukum yang tidak jalan penerapannya.

“Padahal filosofi kita membuat produk hukum tersebut dalam rangka memberi perlindungan terhadap masyarakat, sehingga goalnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” kata Indri.

“Saat kita sering dengar dan temui, saling lempar bola terkait pengimplementasian produk hukum, ini wewenangnya OPD A, ini kewenangan dinas B, dan ini itu, padahal hematnya saya bagian hukum pemkab harus menjadi dirijen mulai dari pengawalan pembentukan dan pengimplementasian produk hukum tersebut, melakukan koordinasi lintas sektoral terhadap OPD-OPD, dan tentunya bupati juga melakukan supervisi sehingga efektifitasnya produk hukum bisa dirasakan,” tukasnya. (mhs)